



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Rejoso yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Rejoso adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rejoso untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Rejoso yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Rejoso adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Rejoso serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Kecamatan Rejoso, hasil evaluasi Renja Kecamatan Rejoso tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Rejoso tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Kecamatan Rejoso.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 55



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN KECAMATAN REJOSO

Jalan Rejosolor No.01 Telp (0343) 484345 - Rejoso
Pasuruan

Ranwal RKPD

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2022

Renja Perangkat Daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah NKRI.

Renja Perangkat Daerah disusun memperhatikan cakupan perencanaan pembangunan nasional yang tujuannya antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD

Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2022 berpedoman pada Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 dan mengacu RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 1 tahun yang menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rejoso.

Rumusan rencana program dan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal :

1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas pada masing-masing desa

Proses penyusunan RKPD yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan daerah menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera dan Maslahat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021

**RENCANA KERJA
KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

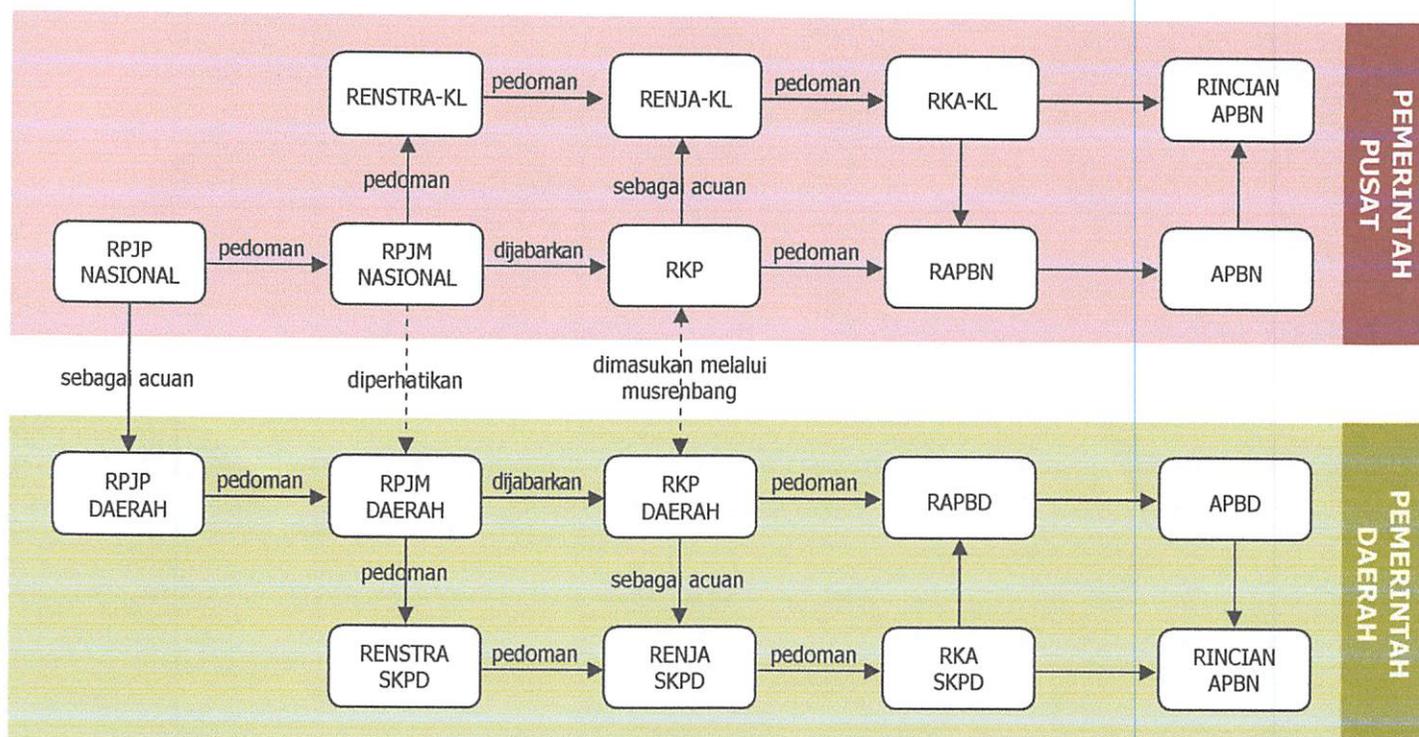
Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Rejoso menyusun Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rejoso. Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2018-2023 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
HUBUNGAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan kecamatan, maka tujuan perencanaan Kecamatan mendukung perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah daerah.

RENJA Tahun 2022 OPD Kecamatan Rejoso memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Rejoso serta kerangka pendanaan daerah, Renja OPD Kecamatan secara substantansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda OPD dan rencana resmi daerah (RPJMD dan Renstra OPD) dengan Renstra K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu:

- 1) Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
- 2) Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
- 3) Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan.
- 4) Pendekatan Top – Down (Atas-Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-program jenjang pemerintah di atasnya.

- 5) Pendekatan Botom-Up (Bawah-Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan ProvinsinJawa Timur;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan-perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanguna jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Kementrian Dalam Negeri tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025;

- 14) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009-2029;
- 15) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
- 16) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
- 17) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
- 18) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Tahun 2022 Kecamatan Rejoso disusun dengan maksud sebagai acuan bagi dalam penyusunan RKA Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2022 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Rejoso Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN REJOSO TAHUN 2020**
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Rejoso
 - 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
- BAB V : PENUTUP**

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra 2018-2023

Kecamatan Rejoso telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2020 bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2018-2023 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020, dan realisasi renstra OPD kecamatan Rejoso yang mengacu pada hasil laporan kinerja Tribunalan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020:

1. Realisasi program/kegiatan Tahu 2020.

No	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	467.808.165	450.712.844	96,35%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.450.000	34.909.317	72,05%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.335.000	4.335.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	36.360.000	35.910.000	98,76%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12.400.500	12.400.500	100,00%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.530.425	5.530.050	99,99%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	5.216.445	5.205.000	99,78%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.152.000	5.152.000	100,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.360.000	93,33%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	35.350.000	35.325.000	99,93%
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	33.913.795	33.035.977	97,41%
	Penyediaan Jasa Perkantoran	277.500.000	275.550.000	99,30%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	98.551.250	98.274.430	99,72%
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	36.078.000	35.856.000	99,38%

	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	62.473.250	62.418.430	99,91%
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	12.907.000	12.907.000	100,00%
	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	8.887.000	8.887.000	100,00%
	Fasilitasi & Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	1.620.000	1.620.000	100,00%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	2.400.000	2.400.000	100,00%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN KECAMATAN	80.732.000	79.262.000	98,18%
	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	18.227.000	17.202.000	94,38%
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	7.020.000	6.975.000	99,36%
	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	55.485.000	55.085.000	99,28%
5	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	4.500.000	3.600.000	80,00%
	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan	4.500.000	3.600.000	80,00%
JUMLAH		664.498.415	644.756.274	97,03%

2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
Wabah Virus Covid-19 di Indonesia menyebabkan Pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan kegiatan yang mengundang orang banyak dan dapat menimbulkan krumunan masyarakat. Sehingga untuk kegiatan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi di tiadakan untuk mengurangi penyebaran Virus Covid-19. Oleh karena itu target kinerja yang sudah direncanakan tidak dapat dicapai sepenuhnya.
3. Impikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
Target capaian program Renstra Tahun 2018-2023 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan RENJA.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor penyebab keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020, pelaksanaan kinerja Kecamatan Rejosu Kabupaten Pasuruan ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan OPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:

Tabel T-C.29
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN REJOSO
 DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN REJOSO s/d TAHUN 2021
 KABUPATEN PASURUAN**

NAMA OPD : KECAMATAN REJOSO

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROG / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TRG CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)	REALISASI TRG KINERJA HASIL PROG DAN KLUARAN kgt s/d TAHUN 2018 (n-3)	TRG DAN REALIASI KINERJA PROG DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2020 (n-2)			TRG PROG DAN KEGIATAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1) 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TRG RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2021 (TAHUN BERJALAN/ n-1)	
					TRG RENJA TAHUN 2020 (n-2)	REALISASI RENJA TAHUN 2020 (n-2)	TINGKAT REALISASI %		REALIASI CAPAIAN	T. CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	PROG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan administrasi kantor	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/ telpon/internet	48 Rekening		48 Rekening	48 Rekening	LQ	48 Rekening	48 Rekening	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	10 Unit		10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	5 Unit	50%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang diberikan honor	9 Orang/ Bulan		9 Orang/ Bulan	9 Orang/ Bulan	100%	9 Orang/ Bulan	9 Orang/ Bulan	100%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	39 Jenis		39 Jenis	39 Jenis	100%	39 Jenis	39 Jenis	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	10 Jenis		10 Jenis	10 Jenis	100%	10 Jenis	10 Jenis	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi List/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung/kantor	8 Jenis		8 Jenis	8 Jenis	100%	8 Jenis	8 Jenis	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	19 Jenis		19 Jenis	19 Jenis	100%	19 Jenis	15 Jenis	79%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	730 Eksemplar		730 Eksemplar	730 Eksemplar	100%	730 Eksemplar	730 Eksemplar	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	19 Jenis		19 Jenis	19 Jenis	100%	19 Jenis	15 Jenis	79%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	730 Eksemplar		730 Eksemplar	730 Eksemplar	100%	730 Eksemplar	730 Eksemplar	100%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kgt rapat dan tamu	24 kali		24 kali	24 kali	100%	24 Kali	12 kali	50%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	10 laporan		10 laporan	10 laporan	100%	12 Laporan	10 Orang/ Bulan	100%
	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL	10 Orang/ Bulan		10 Orang/ Bulan	10 Orang/ Bulan	100%	10 Orang/ Bulan	10 laporan	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tercukupinya pakaian dinas						8 Stel	- Stel	0%
2	PROG PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	- -	- -	-
	Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan yang dibeli	1 Unit		- -	- -	-	1 Unit	- Unit	0%
	pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	13 Jenis		13 Jenis	13 Jenis	100%	15 Jenis	- Jenis	0%
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	5 Jenis		5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	2 Jenis	40%
	Pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan mebelair kantor	7 unit		7 unit	7 unit	100%	7 Unit	2 unit	29%
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang kantor yang terpelihara	9 ruang		9 ruang	9 ruang	100%	10 ruang	- ruang	0%

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROG / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TRG CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)	REALISASI TRG KINERJA HASIL PROG DAN KLUARAN kgt s/d TAHUN 2018 (n-3)	TRG DAN REALIASI KINERJA PROG DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2020 (n-2)			TRG PROG DAN KEGIATAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1) 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TRG RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2021 (TAHUN BERJALAN/ n-1)	
					TRG RENJA TAHUN 2020 (n-2)	REALISASI RENJA TAHUN 2020 (n-2)	TINGKAT REALISASI %		REALIASI CAPAIAN	T. CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7 Unit		7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	7 Unit	100%
3	PROG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Nilai SAKIP Kecamatan Nilai SKM Kecamatan	71 nilai 87 skor		-	-	-	75 Nilai 80 Skor	70 Nilai 83 Skor	50%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	-		-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kecamatan	Peningkatan kegiatan tata kelola pemerintahan desa	-		-	-	-	6 kgt	- kgt	0%
	Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah Desa yang lunas PBB tepat waktu	-		-	-	-	16 Desa	16 Desa	100%
4	PROG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina prosentase usulan musrenbang yang terfasilitasi	-		-	-	-	4 lembaga 70 %	4 lembaga 70 %	0%
	Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	Peningkatan kegiatan sosial masyarakat	-		-	-	-	6 kgt	3 kgt	50%
	Kordinasi pemberdayaan masyarakat	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan organisasi kemasyarakatan	-		-	-	-	5 kgt	- kgt	0%
	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terakomodirnya usulan musrenbang desa	-		-	-	-	16 Desa	16 Desa	100%
5	PROG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	Rasio jumlah kegiatan yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan	-		-	-	-	80 %	80 %	80%
	Fasilitasi Penegakan Perda/Perkada	Terlaksananya fasilitasi penegakan perda/perkada	-		-	-	-	1 kgt	- kgt	0%
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Persentase kantrantibmas yang ditangani	-		-	-	-	3 kgt	1 kgt	30%
6	PROG PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase kedisiplinan aparatur	100%		100%	100%	100%	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tercukupinya pakaian dinas	8 Stel		8 Stel	8 Stel	100%	-	-	-
7	PROG PENIGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja OPD yang tepat waktu	75%		75%	75%	100%	-	-	-
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen pemcanaan dan pelaporan kinerja	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-
	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang tepat waktu	16 Desa		16 Desa	16 Desa	100%	-	-	-
8	PROG KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan kegiatan sosial masyarakat dan pemberdayaan peramuan	75%		75%	75%	100%	-	-	-

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROG / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TRG CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)	REALISASI TRG KINERJA HASIL PROG DAN KLUARAN kgt s/d TAHUN 2018 (n-3)	TRG DAN REALIASI KINERJA PROG DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2020 (n-2)			TRG PROG DAN KEGIATAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1) 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TRG RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2021 (TAHUN BERJALAN/ n-1)	
					TRG RENJA TAHUN 2020 (n-2)	REALISASI RENJA TAHUN 2020 (n-2)	TINGKAT REALISASI %		REALIASI CAPAIAN	T. CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Facilitasi kegiatan sosial masyarakat	Peningkatan kegiatan sosial masyarakat	6 kgt		6 kgt	6 kgt	100%	-	-	-
	Kordinasi pemberdayaan masyarakat	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan organisasi kemasyarakatan	5 kgt		5 kgt	5 kgt	100%	-	-	-
9	PROG FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	Persentase pendapatan nilai asli daerah	75%		75%	75%	100%	-	-	-
	Facilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah Desa yang lunas PBB tepat waktu	16 Desa		16 Desa	16 Desa	100%	-	-	-
10	PROG KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman di masyarakat	80%		80%	80%	100%	-	-	-
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Persentase kantrantibmas yang ditangani	3 kgt		3 kgt	3 kgt	100%	-	-	-
11	PROG KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN	Persentase peningkatan koordinasi dan pembinaan pemerintahan desa	75%		75%	75%	100%	-	-	-
	Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	Peningkatan kegiatan tata kelola pemerintahan desa	7 kgt		7 kgt	7 kgt	100%	-	-	-
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintahan	100 %	-	-	-	-	-	-	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran	100 %	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	13 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	25 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan PNS	13 Orang-bulan	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	13 Orang-bulan	-	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honor pejabat penatausahaan	9 Orang-bulan	-	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur	13 Orang	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	10 Potong	-	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 Orang	-	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	14 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	25 Unit	-	-	-	-	-	-	-

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROG / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TRG CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)	REALISASI TRG KINERJA HASIL PROG DAN KLUARAN kgt s/d TAHUN 2018 (n-3)	TRG DAN REALIASI KINERJA PROG DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2020 (n-2)			TRG PROG DAN KEGIATAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1) 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TRG RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2021 (TAHUN BERJALAN/ n-1)	
					TRG RENJA TAHUN 2020 (n-2)	REALISASI RENJA TAHUN 2020 (n-2)	TINGKAT REALISASI %		REALIASI CAPAIAN	T. CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan	4 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi FORKOMPIMKA	4 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Implementasi ketentuan yang ada dalam Perda	4 Kelompok Kadar Hukum	-	-	-	-	-	-	-

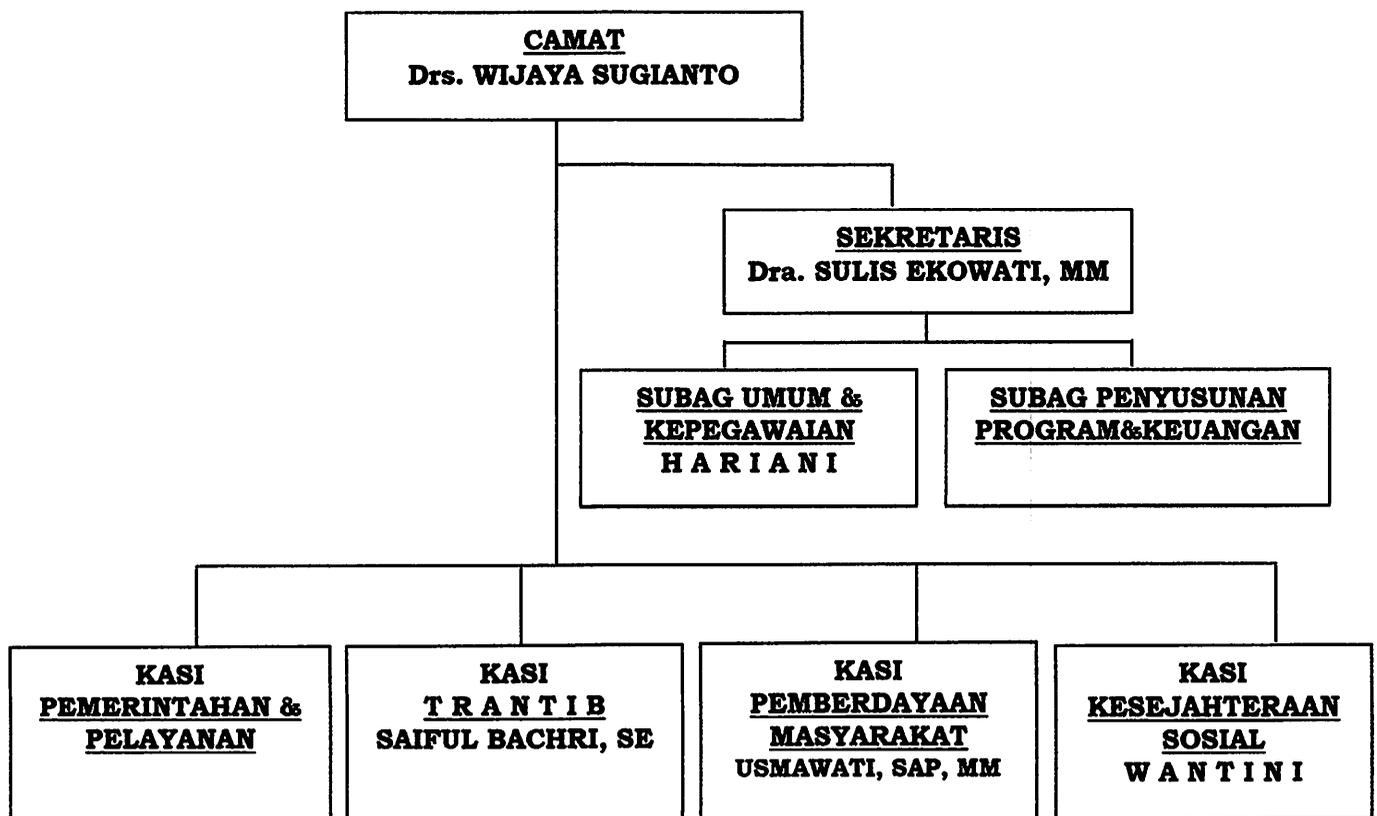
NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROG / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TRG CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)	REALISASI TRG KINERJA HASIL PROG DAN KLUARAN kgt s/d TAHUN 2018 (n-3)	TRG DAN REALIASI KINERJA PROG DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2020 (n-2)			TRG PROG DAN KEGIATAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1) 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TRG RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2021 (TAHUN BERJALAN/ n-1)	
					TRG RENJA TAHUN 2020 (n-2)	REALISASI RENJA TAHUN 2020 (n-2)	TINGKAT REALISASI %		REALIASI CAPAIAN	T. CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian NKRI	Tersosialisasinya tatanan baru / new normal	16 Desa	-	-	-	-	-	-	-
16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa	100 %	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	4 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Tersusunnya Perdes yang baik dan benar	16 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	APBDes dan Laporan Keuangan Desa yang Baik/ Benar	5 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Tertindaknya Pelaksanaan Pilkades	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terwujudnya Dokumen Perencanaan yang terintegrasi dengan Renja Kecamatan	16 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, maka susunan organisasi Kecamatan Rejoso dimaksud terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan yang terdiri:
 - a. Kasubag Umum & Kepegawaian
 - b. Kasubag Penyusunan Program & Keuangan
3. Unsur pelaksana, yaitu :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan & Pelayanan
 - b. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN REJOSO (Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016)



Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan menganisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan /atau Kelurahan;

8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Rejoso berkaitan dengan tugas umum pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Rejoso, yaitu permasalahan pada kebijakan, program, kegiatan dan teknis operasional.

- 1) Pada tingkat kebijakan Pemerintah kecamatan Rejoso dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan sebagai berikut:
 - a. Belum adanya penilaian yang terukur terhadap kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Rejoso.
 - b. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga berdampak pada pembuatan Dokumen Renja.
- 2) Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Rejoso dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:
 - a. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para pejabat pemerintahan mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
 - b. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat OPD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk OPD tersebut selama kurun waktu 5 tahun.
 - c. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilahan, khususnya pemahaman tentang program dan kegiatan yang ada dalam dokumen pelaksanaan anggaran OPD yang bersangkutan.
- 3) Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Rejoso sebagai berikut:
 - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali kurang optimal dalam pelaksanaannya.
 - b. Pola pembinaan pejabat yang belum berorientasi pada peningkatan kerja.
 - c. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Dalam mencapai kinerja pelayanan OPD Kecamatan Rejoso tahun 2019, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu kinerja OPD Kecamatan Rejoso merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel pada tabel 2.2 berikut:

Tabel T-C.30
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD KECAMATAN REJOSO
 KABUPATEN PASURUAN**

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA OPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2020 (thn n-2)	TAHUN 2021 (thn n-1)	TAHUN 2022 (thn n)	TAHUN 2023 (thn n+1)	TAHUN 2020 (thn n-2)	TAHUN 2021 (thn n-1)	TAHUN 2021 (thn n)	TAHUN 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan			83 Skor	85 Skor	87 Skor	90 Skor	81,58 Skor	83,81 Skor	85 Skor	87 Skor	
2	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas			-	80%	85%	90%	-	-	80%	85%	
3	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina			-	70%	75%	80%	-	-	70%	75%	
4	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan			-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan			67 Nilai	69 Nilai	71 Nilai	73 Nilai	65,97 Nilai	67,14 Nilai	69 Nilai	71 Nilai	

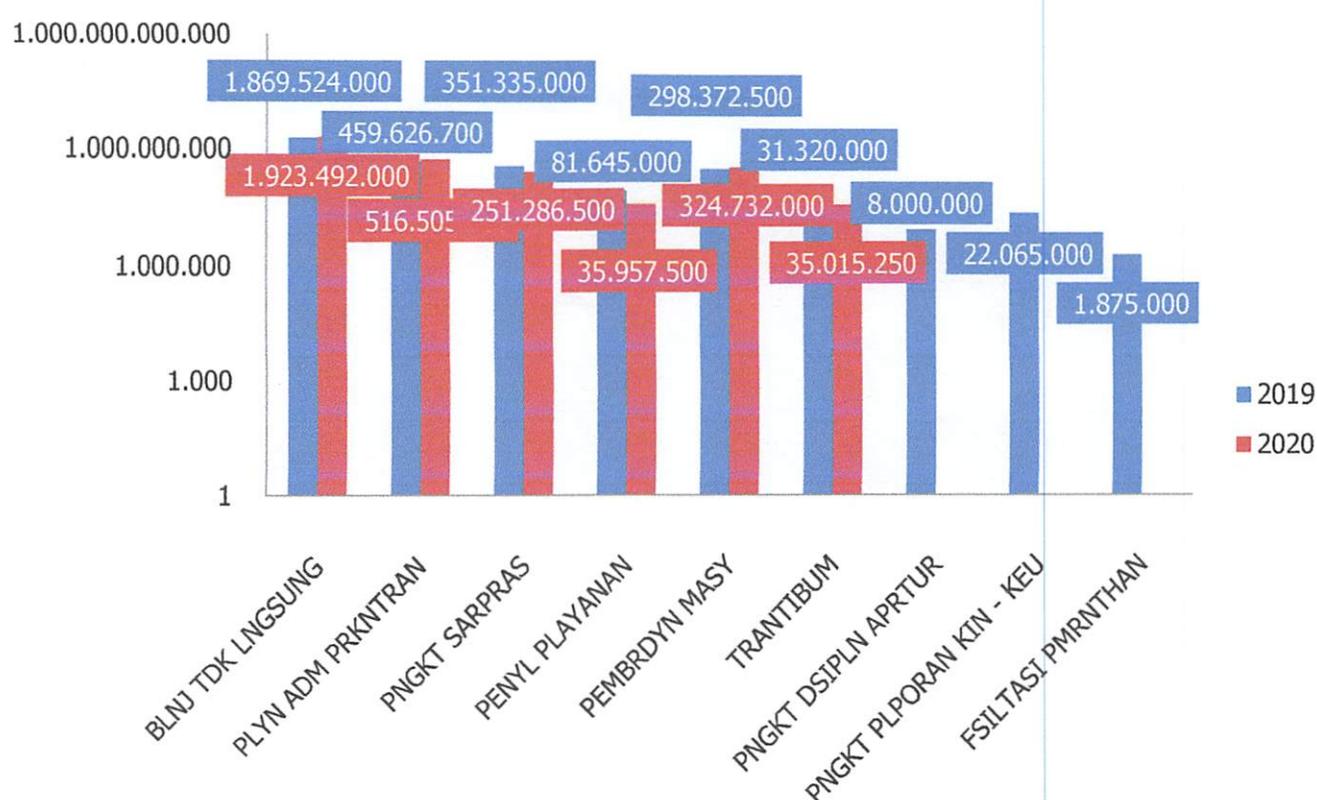
Tabel : 2.1

**KOMPARASI ALOKASI ANGGARAN KECAMATAN REJOSO
TAHUN 2019 - 2020**

NO	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.869.524.000	Rp. 1.923.492.000
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 459.626.700	Rp. 516.505.750
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 351.335.000	Rp. 251.286.500
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Kecamatan	Rp. 81.645.000	Rp. 35.957.500
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Rp. 298.372.500	Rp. 324.732.000
6.	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Rp. 31.320.000	Rp. 35.015.250
7.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 8.000.000	-
8.	Program Peningkatan Pengembangan Sist Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 22.065.000	-
9.	Program Fasilitasi Pemerintahan Kecamatan	Rp. 1.875.000	-
JUMLAH		Rp. 3.123.763.200	Rp. 3.086.989.000

Gambar : 2

**GRAFIK KOMPARIASI ALOKASI ANGGARAN
TAHUN 2019 –2020**



Secara umum pelaksanaan program/ kegiatan di Kecamatan Rejoso dilaksanakan dengan mengacu pada indikator capaian kegiatan, dimana dalam indikator tersebut memuat tentang target kinerja yang harus direalisasikan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala dan hambatan yang menyertai pelaksanaan program/ kegiatan sehingga berpengaruh terhadap realisasi capaian target kinerja yang telah ditentukan, sebagaimana ulasan sebagai berikut :

1. PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program ini bertujuan menyelenggarakan dan memberikan pelayanan administrasi perkantoran agar terwujud tertib administrasi perkantoran.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Jasa Adm Keuangan
- d. Penyediaan ATK
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- i. Penyediaan Mamin Rapat
- j. Rakord dan Konsultasi Luar Daerah
- k. Penyediaan Jasa Perkantoran
- l. Penyediaan Pakaian Kerja

➤ Capaian Kegiatan

Pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Rejoso belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Terhitung sampai dengan Tribulan 3, capaian realisasi anggaran masih berkisar 70%. Namun demikian apabila merujuk pada alokasi anggaran pada masing-masing kegiatan, realisasi anggaran rata-rata mencapai 75%.

Kondisi tersebut banyak dipengaruhi realisasi anggaran pada kegiatan yang bersifat rutin dan pasti, seperti penyediaan jasa administrasi keuangan.

Tabel : 2.2

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
(Berdasarkan DPA Perubahan)**

NO	JENIS KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik	48.450.000,-	27.013.577,-	58%
2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.335.000,-	3.775.000,-	87%
3.	Penyediaan Jasa Adm Keuangan	36.360.000,-	32.950.000,-	90%
4.	Penyediaan ATK	12.400.000,-	10.400.500,-	83%
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.530.000,-	5.030.050,-	91%
6.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.216.445,-	1.450.000,-	28%
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.152.000,-	5.000.000,-	97%
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,-	2.520.000,-	70%
9.	Penyediaan Mamin Rapat	35.350.000,-	14.175.000,-	40%
10.	Rakord dan Konsultasi Luar Daerah	33.913.795,-	22.952.151,-	67%
11.	Penyediaan Jasa Perkantoran	277.500.000,-	228.650.000,-	82%
12.	Penyediaan Pakaian Kerja	Refocusing	-	-
JUMLAH		467.808.165,-	353.916.278,-	75%

➤ **Kendala**

1. Kondisi pandemik COVID-19 menjadi kendala yang paling dominan dalam upaya merealisasi belanja. Arah kebijakan anggaran yang memprioritaskan belanja barang, pada satu sisi diprediksi mampu meningkatkan realisasi penyerapan anggaran. Namun disisi lain terkendala pada berubahnya harga satuan beberapa produk yang mengalami kelangkaan pasar
2. Rencana Aksi Kegiatan belum dapat digunakan sepenuhnya sebagai acuan dalam merealisasi kegiatan dikarenakan adanya prioritas kebijakan yang diarahkan dalam rangka mendukung penanganan COVID-19

➤ **Rekomendasi**

1. Reschedulping atau penjadwalan ulang rencana aksi kegiatan dengan memperhatikan arah prioritas kebijakan anggaran dalam situasi pandemik perlu dilakukan.
2. Rasionalisasi target capaian kinerja dengan memperhatikan situasi pandemik COVID-19, sehingga target kinerja lebih realistis

2. PROG. PENINGKATAN SARPRAS APARATUR

Program ini bertujuan terwujudnya pelayanan yang baik dan prima. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran. Indikator kinerja dari program ini adalah Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas
- b. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas
- c. Pengadaan Meubelair
- d. Pengadaan Peralatan Kantor
- e. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
- f. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional

➤ Capaian Kegiatan

Realisasi program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terpengaruh Pandemi COVID-19, sehingga dalam pelaksanaannya mengalami rasionalisasi melalui refocusing anggaran. Alokasi anggaran pada program ini terkoreksi mencapai 50%. Sampai dengan Tribulan 3 capaian realisasi kegiatan masih 29%

Tabel : 2.3

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN SARPRAS APARATUR (Berdasarkan DPA Perubahan)

NO	JENIS KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas	Refocusing	-	-
2.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Refocusing	-	-
3.	Pengadaan Meubelair	Refocusing	-	-
4.	Pengadaan Peralatan Kantor	Refocusing	-	-
5.	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	36.078.000,-	36.078.000,-	100%
6.	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	62.473.250,-	40.901.430,-	100%
JUMLAH		98.551.250,-	98.551.250,-	100%

➤ Kendala

1. Perubahan prioritas kebijakan anggaran yang diarahkan dalam rangka mendukung penanganan COVID-19, berpengaruh terhadap jadwal realisasi kegiatan. Rencana realisasi kegiatan pada program ini sebagian besar mengalami pergeseran ke Tribulan 4.
2. Arah kebijakan anggaran yang memprioritaskan belanja barang, pada satu sisi diprediksi mampu meningkatkan realisasi penyerapan anggaran. Namun disisi lain terkendala pada berubahnya harga satuan beberapa produk yang mengalami kelangkaan pasar

3. Sebagai catatan bahwa untuk Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor telah dilaksanakan, sedangkan pencatatan dalam laporan realisasi anggaran masih belum dilakukan.

➤ **Rekomendasi**

Rescheduling atau penjadwalan ulang rencana aksi kegiatan setiap tribulan disusun dengan memperhatikan arah prioritas kebijakan anggaran dalam situasi pandemik COVID-19, dan yang tidak kalah pentingnya juga memperhatikan proporsi pembebanan anggaran di masing-masing tribulan.

3. PROG. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di Kecamatan Rejoso dilaksanakan dengan mendorong upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang salah satunya dengan mengedepankan fungsi pembinaan yang mencakup tiga faktor yaitu pembinaan kualitas kerja, pembinaan kemampuan teknis, dan pembinaan penggunaan teknologi

a. **Koord. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

- Pelatihan Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
- Pelatihan Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
- Pelatihan Bidang Perencanaan Pembangunan Kawasan
- Monitoring dan Evaluasi PBB-P2
- Penyusunan Laporan Capaian dan Laporan Keuangan

➤ **Capaian Kegiatan**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan adalah salah satu program yang mendukung Standart Kepuasan Masyarakat (SKM). Refocusing anggaran pada program ini sangat signifikan yang semula Rp. 35.957.500,- mengalami rasionalisasi menjadi Rp. 12.907.000,-, sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam program ini sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------|
| - Pelatihan Bidang Pengelolaan Keuangan Desa | Rp. 8.887.000,- |
| - Monitoring dan Evaluasi PBB-P2 | Rp. 1.620.000,- |
| - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan | Rp. 2.400.000,- |

Capaian target kinerja secara umum dapat diwujudkan, khusus kegiatan Monev PBB-P2 dengan target kinerja lunas PBB-P2 tepat waktu, masih belum dapat diwujudkan, hanya mampu terealisasi 59%

Tabel : 2.4

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN
(Berdasarkan DPA Perubahan)**

NO	JENIS KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Pelatihan Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	8.887.000,-	8.887.000,-	100%
2.	Pelatihan Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Refocusing	-	-
3.	Pelatihan Bidang Perencanaan Pembangunan Kawasan	Refocusing	-	-
4.	Monitoring dan Evaluasi PBB-P2	1.620.000,-	1.620.000,-	100%
5.	Penyusunan Laporan Capaian dan Laporan Keuangan	2.400.000,-	2.400.000,-	100%
JUMLAH		12.907.000,-	12.907.000,-	100%

➤ **Kendala**

1. Kondisi ekonomi masyarakat seiring dengan pandemik COVID-19 berakibat pada pemenuhan target pada program ini terhambat, khususnya pada realisasi target lunas PBB-P2 tepat waktu.
2. Penerapan Pembayaran PBB-P2 sistem online masih terkendala hal-hal yang bersifat teknis.
3. Perubahan besaran PBB-P2 belum disertai dengan sosialisasi kepada Wajib Pajak, sehingga sebagian besar Wajib Pajak keberatan terhadap kenaikan pajak yang harus ditanggungnya

➤ **Rekomendasi**

1. Perlunya sosialisasi perubahan besaran tarip PBB-P2 yang lebih intens
2. Upaya sinkronisasi kebijakan dalam rangka mendorong capaian target kinerja dengan pemerintah desa

4. PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa

a. Fasilitasi Kegiatan Sosial Masy

- Pembinaan Mental Spiritual dan Keagamaan lainnya
- Pelatihan Pengelolaan Sampah
- Lomba MTQ
- Pembinaan Wawasan Kebangsaan
- Penyelenggaraan Manaqib
- Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

- b. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
 - Fasilitasi Pemasaran Melalui Promosi Pasar Murah
 - Pelatihan Santri
 - Pembinaan Industri RmH Tangga/ Industri Kecil dan Menengah
 - Pelatihan Perempuan di Bidang Usaha Ekonomi Kreatif
 - Pembinaan Organisasi Perempuan
- c. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
 - Forum Perencanaan Pembangunan Kecamatan
 - Musrenbang Tingkat Kecamatan

➤ **Capaian Kegiatan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa khususnya pada kegiatan koordinasi pemberdayaan masyarakat diselenggarakan dengan mendorong pelibatan peran TP-PKK Kecamatan dan Desa melalui berbagai pelatihan ketrampilan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan perempuan khususnya ibu-ibu rumah tangga mampu berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Sedangkan pada kegiatan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat, fokus kegiatan diarahkan pada pembangunan mental dan spiritual sehingga terwujud harmonisasi kehidupan sosial dikalangan masyarakat secara luas.

Dalam perjalananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa ini mengalami refocusing anggaran sebagai dampak adanya pandemik COVID-19. Refocusing anggaran pada program ini sangat signifikan yang semula Rp. 324.732.000,- mengalami rasionalisasi menjadi Rp. 80.732.000, sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam program ini sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Manaqib	Rp. 55.485.000,-
- Forum Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Rp. 4.280.000,-
- Musrenbang Tingkat Kecamatan	Rp. 13.947.000,-
- Rakord Rutin TP-PKK	Rp. 7.020.000,-

Penyerapan anggaran pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa mencapai 100%. Capaian penyerapan anggaran tersebut tentunya masih belum disertai dengan capaian target kinerja yang masih belum maksimal

Tabel : 2.5

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PNYL. PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN
(Berdasarkan DPA Perubahan)**

NO	JENIS KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
A.	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masy			
1.	Pembinaan Mental Spiritual dan Keagamaan lainnya	Refocusing	-	-
2.	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Refocusing	-	-
3.	Lomba MTQ	Refocusing	-	-
4.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Refocusing	-	-
5.	Penyelenggaraan Manaqib	55.485.000,-	55.485.000,-	100%
6.	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Refocusing	-	-
B.	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat			
1.	Fasilitasi Pemasaran Melalui Promosi Pasar Murah	Refocusing	-	-
2.	Pelatihan Santri	Refocusing	-	-
3.	Pembinaan Industri Rmh Tangga/ Industri Kecil dan Menengah	Refocusing	-	-
4.	Pelatihan Perempuan di Bidang Usaha Ekonomi Kreatif	Refocusing	-	-
5.	Pembinaan Organisasi Perempuan	7.020.000,-	7.020.000,-	100%
C.	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat			
1.	Forum Perencanaan Pembangunan Kecamatan	4.280.000,-	4.280.000,-	100%
2.	Musrenbang Tingkat Kecamatan	13.947.000,-	13.947.000,-	100%
JUMLAH		80.732.000,-	80.732.000,-	100%

➤ **Kendala**

1. Pembatasan aktifitas warga menyebabkan berubahnya teknis pelaksanaan kegiatan dari tatap langsung menjadi daring. Pelaksanaan kegiatan dengan metode daring masih belum cukup efektif dalam merealisasi target/ output kinerja yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi kegiatan sosial masyarakat yang bersifat keagamaan, masih bersifat seemonial dan belum dapat digunakan sebagai media membahas issue yang sedang berkembang di masyarakat
3. Pelaksanaan kegiatan koordinasi pemberdayaan masyarakat masih belum mengarah upaya mewujudkan penyelarasan dokumen perencanaan antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dengan Pemerintah Desa. Hal ini disebabkan karena minimnya informasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

➤ **Rekomendasi**

1. Perlunya disusun kerangka acuan kerja terhadap kegiatan yang bersifat keagamaan dan diarahkan untuk mampu sebagai media komunikasi antara tokoh masyarakat dan pihak kecamatan dalam rangka membahas issue strategis yang sedang berkembang dilingkungan masyarakat, Sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan penggunaan anggaran lebih efisien
2. Penggunaan teknologi informasi perlu mendapat perhatian dalam rangka mewujudkan sinkronisasi antar dokumen perencanaan. Aplikasi SIPKD yang telah diberlakukan masih belum digunakan sebagai rujukan dalam rangka menyusun usulan program/ kegiatan yang disampaikan dalam Forum Musrenbang baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten

5. PROG. KOORDINASI PENYELENGGARAAN KENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Peyelenggaraan program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu mewujudkan keteraturan, ketentaman dan ketertiban di masyarakat

a. Fasilitasi dan Koord. Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

- Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam rangka pencegahan tindak kriminal
- Pembentukan Paguyuban PKL tingkat desa
- Deteksi Kenakalan Remaja (Narkoba)
- Sosialisasi Perda tentang ketertiban umum

➤ **Capaian Kegiatan**

Program program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum mengalami refocusing anggaran yang semula Rp. 35.015.250,- mengalami rasionalisasi menjadi hanya Rp. 4.500.000,-, sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam program ini sebagai berikut :

- Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan Rp. 4.450.000,- dalam rangka pencegahan tindak kriminal

Penyerapan anggaran mencapai 100%, namun penyerapan anggaran tersebut masih belum disertai dengan capaian target kinerja yang masih belum maksimal

Tabel : 2.6

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM KOORDINASI PNYL. KENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 (Berdasarkan DPA Perubahan)

NO	JENIS KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam rangka pencegahan tindak kriminal	4.500.000,-	4.500.000,-	100%
2.	Pembentukan Paguyuban PKL tingkat desa	Refocusing	-	-
3.	Deteksi Kenakalan Remaja (Narkoba)	Refocusing	-	-
4.	Sosialisasi Perda tentang ketertiban umum	Refocusing	-	-
JUMLAH		4.500.000,-	4.500.000,-	100%

➤ **Kendala**

1. Kerawanan gangguan keamanan masih dipahami dalam konteks tindak kriminal, sedangkan potensi kerawanan yang disebabkan adanya bencana alam belum dipahami sebagai bentuk ancaman ketertiban dan ketentraman masyarakat.

➤ **Rekomendasi**

Mitigasi bencana perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan SDM menghadapi ancaman bencana

2.3. Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan baik lebih dulu adalah pihak kecamatan (Camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan

mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Rejoso, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat ditentukan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi di Kecamatan Rejoso sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD Kecamatan Rejoso dan hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Rejoso.
 - a) Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Rejoso sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Rejoso.
 - b) Belum semuanya terpenuhi usulan-usulan pembangunan di Wilayah Kecamatan Rejoso hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Pasuruan.
 - c) Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Rejoso sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadannya, khususnya untuk peningkatan pelayanan.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional / Internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Tantangan:

- a) Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan
- b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik

Peluang:

- a) Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada
- b) Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Rejoso terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah:
 - a) Urusan Perencanaan Pembangunan

Dalam perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2021, telah dilaksanakan melalui Musrenbang, program dan kegiatan yang diusulkan sudah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yaitu Konektifitas Infrastruktur sehingga sinkron dengan program RPJMD Kabupaten Pasuruan.

b) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pada tahun anggaran 2022, OPD Kecamatan Rejoso, melalui program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan melakukan penertiban, pembinaan, pemantauan sehingga wilayah Kecamatan Rejoso dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung.

c) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pada tahun anggaran 2022, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Rejoso melalui program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Serta penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung.

d) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mewujudkan perekonomian yang handal berbasis potensi dan sebagai kawasan Minapolitan dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif. Kecamatan Rejoso melibatkan masyarakat secara langsung dan pelaku bisnis bersama sama dengan pemerintah dalam perencanaan dan proses pembangunan daerah serta mengelola dan memanfaatkan sumber daya berkelanjutan menuju masyarakat berbudaya, inovatif dan berdaya saing tinggi melalui Program Pemberdayaan Masyarakat.

2.4. Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang

tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja OPD.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini. Berikut proses review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang tingkat Desa, Musrenbang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang fisik, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2021.
2. Alasan proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Rejoso sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja OPD seperti pada tabel berikut :

Tabel T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN PASURUAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2022 (SESUAI RENSTRA)					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2022 (SESUAI KUAPPAS TERBARU)					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintahan	Kec. Rejoso	100%	2.732.435.834	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintahan	Kec. Rejoso	100%	2.071.110.921	
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran	Kec. Rejoso	100%	6.000.000		1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran	Kec. Rejoso	100%	-	
	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	Kec. Rejoso	13 Dokumen	6.000.000		1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	Kec. Rejoso	13 Dokumen	-	
	2 Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	Kec. Rejoso	25 Dokumen	2.213.856.434		2 Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	Kec. Rejoso	25 Dokumen	1.895.966.000	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan PNS			1.856.296.434		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan PNS			1.571.486.000	
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	Kec. Rejoso	13 Orang-bulan	317.000.000		2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	Kec. Rejoso	13 Orang-bulan	283.200.000	
	3 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honor pejabat penatausahaan	Kec. Rejoso	9 Orang-bulan	40.560.000		3 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honor pejabat penatausahaan	Kec. Rejoso	9 Orang-bulan	41.280.000	
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur	Kec. Rejoso	13 Orang	35.000.000		3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur	Kec. Rejoso	13 Orang	5.000.000	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	Kec. Rejoso	10 Potong	10.000.000		1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	Kec. Rejoso	10 Potong	5.000.000	
	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kec. Rejoso	3 Orang	25.000.000		2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kec. Rejoso	3 Orang	-	
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kec. Rejoso	14 Laporan	205.000.000		4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kec. Rejoso	14 Laporan	73.000.000	
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Rejoso	8 Unit	4.000.000		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Rejoso	8 Unit	1.000.000	
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Rejoso	100%	60.000.000		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Rejoso	100%	15.000.000	
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Kec. Rejoso	25 Unit	8.500.000		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Kec. Rejoso	25 Unit	1.500.000	
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	Kec. Rejoso	10 Jenis	12.500.000		4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	Kec. Rejoso	10 Jenis	7.500.000	

	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi perjalanan dinas dan rapat koordinasi	Kec. Rejoso	100%	120.000.000		5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi perjalanan dinas dan rapat koordinasi	Kec. Rejoso	100%	48.000.000	
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kec. Rejoso	100%	50.000.000		5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kec. Rejoso	100%	-	
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Oprasional	Jumlah aset kendaraan dinas roda 2	Kec. Rejoso	1 unit	40.000.000		1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Oprasional	Jumlah aset kendaraan dinas roda 2	Kec. Rejoso	1 unit	-	
	2 Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan mebeleur	Kec. Rejoso	2 buah	10.000.000		2 Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan mebeleur	Kec. Rejoso	2 buah	-	
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Rejoso	100%	45.800.000		6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Rejoso	100%	39.378.668	
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/telepon/internet	Kec. Rejoso	48 Rekening	35.800.000		1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/telepon/internet	Kec. Rejoso	48 Rekening	37.378.668	
	2 Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Rejoso	10 Jenis	10.000.000		2 Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Rejoso	10 Jenis	2.000.000	
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec. Rejoso	100%	176.779.400		7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec. Rejoso	100%	57.766.253	
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Rejoso	7 Unit	100.000.000		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Rejoso	7 Unit	52.766.253	
	2 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	Kec. Rejoso	7 Ruang	76.779.400		2 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	Kec. Rejoso	7 Ruang	5.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Rejoso	85 Skor	78.150.000		2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Rejoso	85 Skor	15.000.000	
	1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan dengan Instansi Terkait	Kec. Rejoso	3 Kegiatan	78.150.000		1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan dengan Instansi Terkait	Kec. Rejoso	3 Kegiatan	15.000.000	
	1 Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- Munculnya Nasionalisme - Terkonsolidasinya Usulan Musrenbang - Tersedianya Data Usulan Musrenbangdes yang sesuai Renja OPD	Kec. Rejoso	- 16 kel - 35% - 16 Desa	78.150.000		1 Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- Munculnya Nasionalisme - Terkonsolidasinya Usulan Musrenbang - Tersedianya Data Usulan Musrenbangdes yang sesuai Renja OPD	Kec. Rejoso	- 16 kel - 35% - 16 Desa	15.000.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Rejoso	100%	132.400.000		3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Rejoso	100%	20.000.000	
	1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Rejoso	4 Kegiatan	132.400.000		1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Rejoso	4 Kegiatan	20.000.000	

	1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	- Meningkatnya Ketrampilan Perempuan di Bidang Wirausaha - Meningkatnya SDM Bidang Komunikasi dan Informasi - Terlaksananya Kegiatan Manaqib Rutin - Terwujudnya Kawasan	Kec. Rejoso	- 16 kel - 16 Web - 6 rekom - 4 kel	132.400.000		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	- Meningkatnya Ketrampilan Perempuan di Bidang Wirausaha - Meningkatnya SDM Bidang Komunikasi dan Informasi - Terlaksananya Kegiatan Manaqib Rutin - Terwujudnya Kawasan	Kec. Rejoso	- 16 kel - 16 Web - 6 rekom - 4 kel	20.000.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Rejoso	100%	14.500.000	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Rejoso	100%	2.035.000	
	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan	Kec. Rejoso	4 Kegiatan	4.500.000		1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan	Kec. Rejoso	4 Kegiatan	2.035.000	
	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi FORKOMPIMKA	Kec. Rejoso	4 Kegiatan	4.500.000		1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi FORKOMPIMKA	Kec. Rejoso	4 Kegiatan	2.035.000	
	2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Implementasi ketentuan yang ada dalam Perda	Kec. Rejoso	4 Kelompok Kadar Hukum	10.000.000		2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Implementasi ketentuan yang ada dalam Perda	Kec. Rejoso	4 Kelompok Kadar Hukum	-	
	1 Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tersosialisasinya tatanan baru / new normal	Kec. Rejoso	16 Desa	10.000.000		1 Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tersosialisasinya tatanan baru / new normal	Kec. Rejoso	16 Desa	-	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa	Kec. Rejoso	100%	29.310.600	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa	Kec. Rejoso	100%	2.035.000	
	1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec. Rejoso	4 Kegiatan	29.310.600		1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec. Rejoso	4 Kegiatan	2.035.000	
	1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Tersusnya Perdes yang baik dan benar	Kec. Rejoso	16 Dokumen	9.770.200		1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Tersusnya Perdes yang baik dan benar	Kec. Rejoso	16 Dokumen	-	
	2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	APBDes dan Laporan Keuangan Desa yang Baik/ Benar	Kec. Rejoso	5 Laporan	9.770.200		2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	APBDes dan Laporan Keuangan Desa yang Baik/ Benar	Kec. Rejoso	5 Laporan	-	
	3 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terwujudnya Dokumen Perencanaan yang terintegrasi dengan Renja Kecamatan	Kec. Rejoso	16 Dokumen	9.770.200		3 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terwujudnya Dokumen Perencanaan yang terintegrasi dengan Renja Kecamatan	Kec. Rejoso	16 Dokumen	-	
							4 Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa		Kec. Rejoso	16 Dokumen	2.035.000	
					2.986.796.434				JUMLAH		2.110.180.921	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja OPD Kecamatan Rejoso Tahun 2022 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat. Berikut tahapan-tahapan hasil dari musrenbang:

- a. Bahwa usulan program/ kegiatan yang dibahas didalam Musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat dusun/ lingkungan melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga mengahisiskan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.
- b. Dalam Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing OPD.

Dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut diharapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Rejoso dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan seperti pada tabel berikut:

Tabel T-C.32
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
 DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021**

OPD : Kecamatan Rejoso

NO	LOKASI		URUSAN	USULAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI MITRA BAPPEDA	STATUS
	DESA	ALAMAT					
1	ARJOSARI	Dusun Sedengan RT. 04 RW. 03 Desa Arjosari, Kab. Pasuruan, Rejoso, Arjosari	Pertanian	Pembangunan / rehan jalan usaha tani	Petani Sering Mengeluhkan Jalan Usaha Tani yang sulit untuk dilewati kendaraan sehingga produktifitas pertanian tidak dapat maksimal	Rekomendasi : Pembangunan / rehan jalan usaha tani Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
2	JARANGAN	Dusun Pade;an, Kab. Pasuruan, Rejoso, Jarangan	Pertanian	Bantuan Alat pasca panen	kekurangan alat untuk mengangkut ikan yang akan di bawa ke pasar	Rekomendasi : Usulan dilengkapi dengan Volume, Satuan, Foto, Proposal , koordinat dan akan diverifikasi pada saat Musrenbang Kecamatan Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
3	KARANGPANDAN	Desa Karangpandan RT 03 RW 01, Kab. Pasuruan, Rejoso, Karangpandan	Pertanian	Pembangunan / rehan jalan usaha tani	Jalan Jelek dan rusak Butuh peningkatan	Rekomendasi : Pembangunan / rehan jalan usaha tani Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
4	KAWISREJO	Desa Kawisrejo, Kab. Pasuruan, Rejoso, Kawisrejo	Kelautan dan Perikanan	<u>Fasilitasi Akses Permodalan</u>	Kekurangan permodalan BUMdes	Rekomendasi : Usulan dilengkapi dengan Volume, Satuan, Foto, Proposal , koordinat dan akan diverifikasi pada saat Musrenbang Kecamatan Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
5	KAWISREJO	dusun gapuk dan dusun telbuk, Kab. Pasuruan, Rejoso, Kawisrejo	Pariwisata	Pembangunan Gapura / Bando Wisata, aksesibilitas dan Fasilitas Penunjang	gapura pembatas antar desa	Rekomendasi : Usulan dilengkapi dengan Tinggi , Lebar, Volume, Satuan, Foto, Proposal, Koordinat dan akan diverifikasi pada saat Musrenbang Kecamatan Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
6	KEDUNGBAKO	dusun krajan rt04/rw02, Kab. Pasuruan, Rejoso, Kedungbako	Pertanian	Pembangunan / rehan jalan usaha tani	meningkatkan hasil pertanian	Rekomendasi : Pembangunan / rehan jalan usaha tani Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
7	KEMANTRENREJO	jalan lingkaran timur dari dusun kemantren menuju dusun trimo, Kab. Pasuruan, Rejoso,	Pertanian	Pembangunan / rehan jalan usaha tani	petani kesulitan untuk pengelolaan dan pengangkutan hasil panen jalannya becek tidak bisa dilewati kendaraan	Rekomendasi : Pembangunan / rehan jalan usaha tani Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
8	KEMANTRENREJO	jalan pertanian dusun kemantren menuju dusun tanjung, Kab. Pasuruan, Rejoso,	Pertanian	Pembangunan / rehan jalan usaha tani	petani kesulitan untuk pengelolaan dan pengangkutan hasil panen. jalannya becek tidak bisa dilewati kendaraan.	Rekomendasi : Pembangunan / rehan jalan usaha tani Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
9	KETEGAN	Desa Ketegan, Kab. Pasuruan, Rejoso, Ketegan	Pertanian	- kegiatan Hibah ternak besar/kecil	Ternak Kambing	Rekomendasi : Usulan dilengkapi dengan Volume, Satuan, Foto, Proposal , koordinat dan akan diverifikasi pada saat Musrenbang Kecamatan Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
10	PANDANREJO	Dusun Suklan Desa Pandanrejo, Kab. Pasuruan, Rejoso, Pandanrejo	Pertanian	Pembangunan/Rehab Jaringan Irigasi tersier	Saluran/Jaringan Irigasi masih dari tanah belum tersentuh pembangunan	Rekomendasi : Pembangunan/Rehab Jaringan Irigasi tersier Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
11	PATUGURAN	Desa Patuguran, Kab. Pasuruan, Rejoso, Patuguran	Pertanian	Bantuan alat mesin pertanian	Pompa Air 4 Unit	Rekomendasi : Usulan dilengkapi dengan Volume, Satuan, Foto, Proposal , koordinat dan akan diverifikasi pada saat Musrenbang Kecamatan Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
12	SAMBIREJO	Dusun Budug Desa Sambirejo (blok redjo), Kab. Pasuruan, Rejoso, Sambirejo	Pertanian	Pembangunan / rehan jalan usaha tani	Jalan rusak, akses pertanian sulit	Rekomendasi : Pembangunan / rehan jalan usaha tani Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
13	SEGOROPURO	Dusun Boto Rt 003 Rw 003 Desa Segoropuro, Kab. Pasuruan, Rejoso, Segoropuro	Pertanian	Pembangunan / rehan jalan usaha tani	Jalan Masih Tanah Dan Untuk Memperlancar Usaha Petani Dengan Panjang dan Luas 650 x 3 M	Rekomendasi : Pembangunan / rehan jalan usaha tani Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
14	TOYANING	PERSAWAHAN Dusun Turi, Kab. Pasuruan, Rejoso, Toyaning	Pertanian	Pembangunan / rehan jalan usaha tani	Kesulitan Menuju Area PERTANIAN	Rekomendasi : Pembangunan / rehan jalan usaha tani Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan

NO	LOKASI		URUSAN	USULAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI MITRA BAPPEDA	STATUS
	DESA	ALAMAT					
15	TOYANING	PERSAWAHAN Dusun Ngemplak, Kab. Pasuruan, Rejoso, Toyaning	Pertanian	Pembangunan / rehan jalan usaha tani	Kesulitan Menujuh Area PERTANIAN	Rekomendasi : Pembangunan / rehan jalan usaha tani Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
16	ARJOSARI	Dusun Klenggoan RT. 01 RW. 05 Desa Arjosari, Kab. Pasuruan, Rejoso, Arjosari	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran Irigasi	Pengedapan sedimen di saluran irigasi menyebabkan kurangnya debit air sehingga sawah sering tidak dapat teraliri air dengan baik, terkadang pada musim hujan juga menyebabkan sawah kebaniran	Rekomendasi : Usulan ini akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5) dan prioritas desa (1-5), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera, Harus dilengkapi Proposal, volume dan anggaran akan diisi pada saat musrenbang kecamatan Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
17	ARJOSARI	Dusun Sedengan, Kab. Pasuruan, Rejoso, Arjosari	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekonstruksi Jalan (rusak berat)	Jalan Poros yang Menghubungkan Desa Arjosari dengan Desa Toyaning sudah dalam kondisi rusak, sehingga warga sering mengeluhkan tentang jalan yang rusak tersebut	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Validasi Mitra Bappeda
18	JARANGAN	Dusun Jarangan RT 01 RW 01, Kab. Pasuruan, Rejoso, Jarangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekonstruksi Jalan (rusak berat)	jalan rusak sepanjang 500 M dengan lebar 3,5 M	Rekomendasi : - usulan akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
19	JARANGAN	Dusun Pade'an RT 01 RW 03, Kab. Pasuruan, Rejoso, Jarangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekonstruksi Jalan (rusak berat)	Jalan Rusak Sepanjang 500 M dengan Lebar 3,5 M	Rekomendasi : Usulan ini akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5) dan prioritas desa (1-10), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera; Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
20	JARANGAN	Dusun Jarangan RT 10 RW 01, Kab. Pasuruan, Rejoso, Jarangan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Jalan Lingkungan Perkotaan di Kelurahan	semakin mengikis jalan dan penyempitan sungai sepanjang 200 M	Rekomendasi : Usulan ini akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5) dan prioritas desa (1-10), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera, Harus dilengkapi Proposal, volume dan anggaran akan diisi pada saat musrenbang kecamatan Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
21	KARANGPANDAN	Desa karangpandan Rt 02 Rw 01, Kab. Pasuruan, Rejoso, Karangpandan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jembatan lingkungan Perkotaan di Kelurahan	Pembangunan Jembatan Baru Untuk Akses Jalan Tercepat	Rekomendasi : Usulan ini akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5) dan prioritas desa (1-5), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera, Harus dilengkapi Proposal, volume dan anggaran akan diisi pada saat musrenbang kecamatan Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
22	KAWISREJO	sungai ruji desa kawisrejo, Kab. Pasuruan, Rejoso, Kawisrejo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Turap/talud/bronjong	mengatasi banjir	Rekomendasi : - Usulan ini akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5) dan prioritas desa (1-10), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
23	KEDUGBAKO	dusun suruh, Kab. Pasuruan, Rejoso, Kedungbako	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan	peningkatan saluran pembuangan air hujan	Rekomendasi : Usulan ini akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5) dan prioritas desa (1-10), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera, Harus dilengkapi Proposal, volume dan anggaran akan diisi pada saat musrenbang kecamatan Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
24	KETEGAN	Dusun Ketegan RT 02 RW 01, Kab. Pasuruan, Rejoso, Ketegan	Lingkungan Hidup	Pembangunan TPS/TPS 3R	Pembangunan Baru	Rekomendasi : Usulan ini akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5) dan prioritas desa (1-5), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera, Harus dilengkapi Proposal, volume dan anggaran akan diisi pada saat musrenbang kecamatan Koefisien : 0 0,0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
25	KETEGAN	Dusun Petahunan RT 03 RW 02, Kab. Pasuruan, Rejoso, Ketegan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Bangunan / Saluran Jaringan Irigasi	Rusak	Rekomendasi : Rekomendasi : Usulan ini akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5) dan prioritas desa (1-5), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera, Harus dilengkapi Proposal, volume dan anggaran akan diisi pada saat musrenbang kecamatan Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
26	MANIKREJO	Manikrejo, Kab. Pasuruan, Rejoso, Manikrejo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Sering terjadinya kejahatan di malam hari ketika melintas di jalan	Rekomendasi : Usulan ini akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5) dan prioritas desa (1-5), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera, Harus dilengkapi Proposal, volume dan anggaran akan diisi pada saat musrenbang kecamatan Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan

NO	LOKASI		URUSAN	USULAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI MITRA BAPPEDA	STATUS
	DESA	ALAMAT					
27	MANIKREJO	Manikrejo, Kab. Pasuruan, Rejoso, Manikrejo	Lingkungan Hidup	Pembangunan TPS/TPS 3R	Butuh pengolahan sampah Rumah tangga	Rekomendasi : Usulan ini akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5) dan prioritas desa (1-10), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera, Harus dilengkapi Proposal, volume dan anggaran akan diisi pada saat musrenbang kecamatan Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
28	PANDANREJO	Dusun Suklan Desa Pandanrejo menuju Desa Toyaning, Kab. Pasuruan, Rejoso, Pandanrejo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan (rusak ringan)	jalan rusak dan Banyaknya lobang pada jalan	Rekomendasi : - Usulan ini akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5) dan prioritas desa (1-10), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
29	PATUGURAN	Dusun Tambakrejo RT.05 RW.03 Desa Patuguran, Kab. Pasuruan, Rejoso, Patuguran	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekonstruksi Jalan (rusak berat)	Jalan rusak menuju wisata Mangrove, sepanjang 3m x 2.000m = 6.000m	Rekomendasi : - Usulan ini akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5) dan prioritas desa (1-10), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
30	REJOSOKIDUL	Dusun Balidono, Kab. Pasuruan, Rejoso, Rejoso Kidul	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekonstruksi Jalan (rusak berat)	Jalan Rusak berat, mengganggu aktivitas warga	Rekomendasi : Usulan ini akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5) dan prioritas desa (1-5), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera, Harus dilengkapi Proposal, volume dan anggaran akan diisi pada saat musrenbang kecamatan Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
31	REJOSOKIDUL	Dusun Krandon Lor, Kab. Pasuruan, Rejoso, Rejoso Kidul	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekonstruksi Jalan (rusak berat)	Sering terjadi banjir, mengganggu aktifitas warga	Rekomendasi : Usulan ini akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5) dan prioritas desa (1-5), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera, Harus dilengkapi Proposal, volume dan anggaran akan diisi pada saat musrenbang kecamatan Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
32	REJOSOLOR	Dusun Kedungbendo RT 01 / RW 03 Desa Rejosolor, Kab. Pasuruan, Rejoso, Rejoso Lor	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekonstruksi Jalan (rusak berat)	Jalan Rusak Berat	Rekomendasi : - Usulan ini akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5) dan prioritas desa (1-10), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
33	REJOSOLOR	Dusun Sidowayah RT 03 & 04 Desa Rejosolor, Kab. Pasuruan, Rejoso, Rejoso Lor	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya penerangan jalan lingkungan yang layak	Rekomendasi : Usulan ini akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5) dan prioritas desa (1-5), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera, Harus dilengkapi Proposal, volume dan anggaran akan diisi pada saat musrenbang kecamatan Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
34	SADENGREJO	Dusun Sadeng RT 04 RW 02, Kab. Pasuruan, Rejoso, Sadengrejo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan (rusak ringan)	akses jalan tidak bisa dilewati waktu banjir	Rekomendasi : - Usulan ini akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5) dan prioritas desa (1-10), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
35	SADENGREJO	Sungai Sepanjang Dusun sadeng RT 05 s/d RT 01 RW 01.02, Kab. Pasuruan, Rejoso, Sadengrejo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran Irigasi	Sungai tidak bisa menampung debit air sehingga mengakibatkan banjir	Rekomendasi : Rekomendasi : Usulan ini akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5) dan prioritas desa (1-5), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera, Harus dilengkapi Proposal, volume dan anggaran akan diisi pada saat musrenbang kecamatan Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
36	SAMBIREJO	Desa Sambirejo, Kab. Pasuruan, Rejoso, Sambirejo	Lingkungan Hidup	Pengadaan Alat Pengumpul Sampah (gerobak, sepeda motor/ kendaraan roda tiga)	Kendaraan pengangkut sampah	Rekomendasi : Usulan ini akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5) dan prioritas desa (1-10), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera, Harus dilengkapi Proposal, volume dan anggaran akan diisi pada saat musrenbang kecamatan Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
37	SEGOROPURO	Dusun Krajan Rt 002 Rw 001 Desa Segoropuro, Kab. Pasuruan, Rejoso, Segoropuro	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan (rusak ringan)	HOT MIX Luas 1.800 M	Rekomendasi : - Usulan ini akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5) dan prioritas desa (1-10), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
38	SEGOROPURO	Dusun Bedodo Rt 001 Rw 005 Sampai Ke Dusun Krajan Rt 002 Rw 002 Desa Segoropuro, Kab. Pasuruan, Rejoso, Segoropuro	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jalan Desa Untk Menerangi Jalan Menuju Ke Wisata Relligi	Rekomendasi : Usulan ini akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5) dan prioritas desa (1-5), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera, Harus dilengkapi Proposal, volume dan anggaran akan diisi pada saat musrenbang kecamatan Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
39	TOYANING	Desa TOYANING, Kab. Pasuruan, Rejoso, Toyaning	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekonstruksi Jalan (rusak berat)	Kesulitan Menuju Jalur Ekonomi dan Pendidikan	Rekomendasi : - Usulan ini akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5) dan prioritas desa (1-10), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan

NO	LOKASI		URUSAN	USULAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI MITRA BAPPEDA	STATUS
	DESA	ALAMAT					
40	ARJOSARI	Balai Desa Arjosari, Kab. Pasuruan, Rejoso, Arjosari	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bantuan Keuangan untuk Rehabilitasi Balai Desa	Balai Desa Sudah Banyak yang rapuh, sehingga membahayakan masyarakat	Rekomendasi : Dapat dibahas dalam Musrenbang Kecamatan Koefisien : 1 unit Anggaran : 100000000	Diteruskan ke Forum SKPD
41	KARANGPANDAN	Desa Karangpandan RT 03 RW 05, Kab. Pasuruan, Rejoso, Karangpandan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bantuan Keuangan untuk Rehabilitasi Balai Desa	Balai Desa Perlu Dilanjutkan Rehab Pembangunan nya	Rekomendasi : Dapat dibahas dalam Musrenbang Kecamatan Koefisien : 1 unit Anggaran : 100000000	Diteruskan ke Forum SKPD
42	KAWISREJO	desa kawisrejo, Kab. Pasuruan, Rejoso, Kawisrejo	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rehabilitasi Kantor Desa	lanjutan rehab kantor desa		Validasi Mitra Bappeda
43	KEDUNGBAKO	dusun krajan Rt.01/rw.02, Kab. Pasuruan, Rejoso, Kedungbako	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bantuan Keuangan untuk Rehabilitasi Balai Desa	kurang layak	Rekomendasi : Dapat dibahas dalam Musrenbang Kecamatan Koefisien : 1 unit Anggaran : 100000000	Diteruskan ke Forum SKPD
44	KEMANTRENREJO	Dusun Pejambon, Kab. Pasuruan, Rejoso, Kemantren Rejo	Perpustakaan	Pengadaan Buku Pengetahuan Umum	untuk manggalakkan budaya membaca dan menambah ilmu pengetahuan umum bagi seluruh masyarakat	Rekomendasi : Sudah sesuai Program Koefisien : 0 eksemplar Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
45	KEMANTRENREJO	lapangan dusun kemantren desa kemantrenrejo kecamatan rejoso, Kab. Pasuruan, Rejoso, Kemantren Rejo	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Pasar Desa	peningkatan ekonomi masyarakat	Rekomendasi : Dapat dibahas dalam Musrenbang Kecamatan Koefisien : 1 unit Anggaran : 100000000	Diteruskan ke Forum SKPD
46	KETEGAN	Dusun Ketegan RT 03 RW 01, Kab. Pasuruan, Rejoso, Ketegan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan	Alih Fungsi Rumah Dinas Kepala Desa	Rekomendasi : Usulan ini akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5) dan prioritas desa (1-5), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera, Harus dilengkapi Proposal, volume dan anggaran akan diisi pada saat musrenbang kecamatan Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
47	MANIKREJO	Dusun Buaran RT 004 RW 001, Kab. Pasuruan, Rejoso, Manikrejo	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Pasar Desa	Banyaknya pedagang peracangan yang tidak memiliki tempat permanen untuk berjualan di desa	Rekomendasi : Dapat dibahas dalam Musrenbang Kecamatan Koefisien : 1 unit Anggaran : 100000000	Diteruskan ke Forum SKPD
48	PANDANREJO	Dusun Pandansari Desa Pandanrejo, Kab. Pasuruan, Rejoso, Pandanrejo	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bantuan Keuangan untuk Rehabilitasi Balai Desa	Kantor dan Balai Desa Banyak Yang Bocor	Rekomendasi : Dapat dibahas dalam Musrenbang Kecamatan Koefisien : 1 unit Anggaran : 100000000	Diteruskan ke Forum SKPD
49	PATUGURAN	Dusun Dadapan Desa Patuguran, Kab. Pasuruan, Rejoso, Patuguran	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Pasar Desa	Pengadaan Pasar Serba Olahan Ikan Ukuran 20m x 40m = 800m	Rekomendasi : Dapat dibahas dalam Musrenbang Kecamatan Koefisien : 1 unit Anggaran : 100000000	Diteruskan ke Forum SKPD
50	REJOSOKIDUL	Dusun Karang Anyar, Kab. Pasuruan, Rejoso, Rejoso Kidul	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rehabilitasi Kantor Desa	Karena butuh rehab ruangan	Rekomendasi : Dokumen pendukung harap dilengkapi saat Musrenbang Kecamatan Koefisien : 1 unit Anggaran : 100000000	Diteruskan ke Forum SKPD
51	REJOSOLOR	Dusun Lirboyo RT 03 / RW 02 Desa Rejosolor, Kab. Pasuruan, Rejoso, Rejoso Lor	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Pagar Kantor Kelurahan	Pagar Kantor Kurang layak	Rekomendasi : Usulan ini akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5) dan prioritas desa (1-5), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera, Harus dilengkapi Proposal, volume dan anggaran akan diisi pada saat musrenbang kecamatan Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
52	SADENGREJO	Dusun sadeng RT 04 RW 02, Kab. Pasuruan, Rejoso, Sadengrejo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan	Kurang layaknya ruang pelayanan desa	Rekomendasi : Usulan ini akan disetujui jika termasuk dalam prioritas daerah (1-5) dan prioritas desa (1-5), termasuk urgenitas/percepatan penanganan segera, Harus dilengkapi Proposal, volume dan anggaran akan diisi pada saat musrenbang kecamatan Koefisien : 0 0.0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Forum SKPD
53	SAMBIREJO	Desa Sambirejo, Kab. Pasuruan, Rejoso, Sambirejo	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bantuan Keuangan untuk Rehabilitasi Balai Desa	Atap rusak, Tiang kropos,	Rekomendasi : Dapat dibahas dalam Musrenbang Kecamatan Koefisien : 1 unit Anggaran : 100000000	Diteruskan ke Forum SKPD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Rejoso, dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Rejoso telah disesuaikan dengan arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel : 3.1

PRIORITAS DAERAH DAN PRIORITAS RKPD TAHUN 2022

No	Uraian	Tujuan	Sasaran
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui yang prima kepada masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini agar tercipta aparatur yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik	Kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik dari pemerintahan	Masyarakat umum
2	Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata melalui Musrenbang RKPD	Sarana yang memadai di masyarakat	Masyarakat umum
3	Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya.	Ekonomi merata di segala bidang	Masyarakat umum
4	Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi	Reformasi birokrasi tanpa melanggar hukum yang ada	Organisasi /LSM/masyarakat umum

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik yang menunjukkan kondisi yang akan dicapai dimasa mendatang sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka upaya mewujudkan keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan OPD Kecamatan Rejoso, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat se Kecamatan Rejoso baik masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, Karang taruna, LPMD, dsb), serta koordinator pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam rangka memberikan kepuasan peayanan bagi masyarakat.
3. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang profesionalisme sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Pasuruan yang Maslahat.
4. Mewujudkan sistem pelaporan keuangan yang baik dan akuntabel.

Adapun sasaran strategik Kecamatan Rejoso merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategik yang terkait.

Sasaran strategik Kecamatan Rejoso pengelompokkannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rancangan pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Adapun keselaran program kegiatan dengan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel : 3.1

KESELARASAN PROGRAM KEGIATAN DENGAN TUJUAN DAN SASARAN

OPD : KECAMATAN REJOSO

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN TAHUN 2022	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	69 Nilai	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
				1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
				2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
				2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya
				3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				2. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	80%	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				1. Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	70%	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				1. Peningkatan Efektifitas Kgtn Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan
				4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa
				1. Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa
	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	100%	5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

3.3. Program dan kegiatan

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah:
1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun.
 2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan.
 3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa se Kecamatan.

- b. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKOPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah :

Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKOPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.

- c. Rencana program dan kegiatan.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Administrasi keuangan perangkat daerah

- Penyediaan gaji ASN dan tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan
 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa

Rumusan rencana program dan kegiatan OPD Tahun 2021 dan diperkirakan maju Tahun 2022 Kabupaten Pasuruan untuk sumber dana APBD Kabupaten secara detail dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi tentang rumusan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Rejoso Tahun 2022 disertai dengan Indikator Kinerja dan pagu indikatif. Rumusan rencana program dan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun.
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan.
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas pada masing-masing desa di wilayah Kecamatan Rejoso

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2022 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel T-C.33
**RINCIAN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
 TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
 KABUPATEN PASURUAN**

Nama OPD : KECAMATAN REJOSO

KODE	URUSAN/ BID URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2023	
			T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Kewilayahan							
	Bidang Urusan Kewilayahan							
7.01.01	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintahan	87 skor	2.071.110.921			90 skor	2.735.977.458
7.01.01.2.02	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan adm keu	100%	1.895.966.000	DAU		100%	2.270.977.458
7.01.01.2.02.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan PNS	28 dok	1.571.486.000			28 dok	1.946.497.458
				Belanja Pegawai : 1.571.486.000				1.946.497.458
				Belanja Barang & Jasa : -				-
				Belanja Modal : -				-
7.01.01.2.02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	12 dok	283.200.000			12 dok	283.200.000
				Belanja Pegawai : -				-
				Belanja Barang & Jasa : 283.200.000				283.200.000
				Belanja Modal : -				-
7.01.01.2.02.03	3 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honor pejabat penatausahaan	12 dok	41.280.000			12 dok	41.280.000
				Belanja Pegawai : -				-
				Belanja Barang & Jasa : 41.280.000				41.280.000
				Belanja Modal : -				-
7.01.01.2.05	2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya profesionalisme aptur	100%	10 5.000.000	DAU		100%	10.000.000
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	7 stel	5.000.000			10 stel	10.000.000
				Belanja Pegawai : -				-
				Belanja Barang & Jasa : 5.000.000				10.000.000
				Belanja Modal : -				-
7.01.01.2.06	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adm Umum	100%	73.000.000			100%	237.000.000
7.01.01.2.06.01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis	1.000.000	DAU		8 jenis	5.000.000
				Belanja Pegawai : -				-
				Belanja Barang & Jasa : 1.000.000				5.000.000
				Belanja Modal : -				-
7.01.01.2.06.02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 jenis	15.000.000	DAU		19 jenis	55.000.000
				Belanja Pegawai : -				-
				Belanja Barang & Jasa : 15.000.000				25.000.000
				Belanja Modal : -				30.000.000
7.01.01.2.06.03	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	18 jenis	1.500.000	DAU		18 jenis	7.000.000
				Belanja Pegawai : -				-
				Belanja Barang & Jasa : 1.500.000				7.000.000
				Belanja Modal : -				-

KODE	URUSAN/ BID URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2023	
			T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.06.05	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	10 dok	7.500.000 Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 7.500.000 Belanja Modal : -	DAU		10 dok	20.000.000 - 20.000.000 -
7.01.01.2.06.09	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi perjalanan dinas dan rapat koordinasi	10 kgt	48.000.000 Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 48.000.000 Belanja Modal : -	DAU		10 kgt	150.000.000 - 150.000.000 -
7.01.01.2.08	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	39.378.668	DAU		100%	48.000.000
7.01.01.2.08.02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/ air/ telepon/ internet	48 rek	37.378.668 Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 37.378.668 Belanja Modal : -			48 rek	38.000.000 - 38.000.000 -
7.01.01.2.08.03	2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah service peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	2.000.000 Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 2.000.000 Belanja Modal : -	DAU		12 jenis	10.000.000 - 10.000.000 -
7.01.01.2.09	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	57.766.253	DAU		100%	170.000.000
7.01.01.2.09.02	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	7 unit	52.766.253 Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 52.766.253 Belanja Modal : -			7 unit	120.000.000 - 120.000.000 -
7.01.01.2.09.09	2 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ kantor	7 ruang	5.000.000 Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 5.000.000 Belanja Modal : -	DAU		5 ruang	50.000.000 - 50.000.000 -
7.01.02.2	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	69 nilai	15.000.000			69 nilai	70.000.000
7.01.02.2.01	1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan dengan Instansi Terkait	3 kgt	15.000.000			3 kgt	70.000.000
7.01.02.2.01.01	1 Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		100%	15.000.000 Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 15.000.000 Belanja Modal : -			100%	70.000.000 - 70.000.000 -
7.01.03	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan Masyarakat Desa	69 nilai	20.000.000	DAU		69 nilai	
7.01.03.2.01	1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan	100%	20.000.000			100%	60.000.000
7.01.03.2.01.03	1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan		100%	20.000.000			100%	60.000.000

KODE	URUSAN/ BID URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2023	
			T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan			Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 20.000.000 Belanja Modal : -				60.000.000 -
7.01.04	4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban umum	69 nilai	2.035.000			69 nilai	8.000.000
7.01.04.2.01	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan	100%	2.035.000			100%	8.000.000
7.01.04.2.01.01	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koord FORKOMPIMKA	4 kgt	2.035.000	DAU		4 kgt	8.000.000
				Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 2.035.000 Belanja Modal : -				- 8.000.000 -
7.01.06	5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa	69 nilai	2.035.000			69 nilai	10.000.000
7.01.06.2.01	1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	2.035.000	DAU		100%	10.000.000
7.01.06.2.01.03	1 Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya administrasi tata pemerintah yang baik	16 desa	2.035.000			16 desa	10.000.000
				Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 2.035.000 Belanja Modal : -				- 10.000.000 -
				Belanja Pegawai : 1.571.486.000			Belanja Pegawai : 1.946.497.458	
				Belanja Barang & Jasa : 538.694.921			Belanja Barang & Jasa : 907.480.000	
				Belanja Modal : -			Belanja Modal : 30.000.000	
				Total Belanja PD : 2.110.180.921				2.883.977.458

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat untuk saling bekerjasama dalam melaksanakan program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rejoso yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-w2023, serta mengacu pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018.

RKPD menjadi pedoman Kecamatan Rejoso dalam menyusun RKA Tahun 2022. Selain itu, RKPD Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil RKPD 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan.

Diharapkan proses penyusunan RKPD yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan daerah menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera dan Maslahat.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M.IRSYAD YUSUF